

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG TA 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (SAP,2010). Laporan keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung disusun untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja, Laporan Operasional, Neraca Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan (SAP, 2010):

a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka, dan menyeluruh atas pertanggungjawaban keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (SAP,2010). Pelaporan keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

a) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

b) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

- c) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- d) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- e) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat yang dilakukan selama periode pelaporan.

Komponen laporan keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung terdiri dari:

- a) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (LRA)
- b) Laporan Operasional (LO)
- c) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- d) Neraca
- e) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran untuk memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding. Penyajian anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif sesuai peraturan perundang undangan (SAP 2010). Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Pendapatan
- b) Belanja
- c) Transfer
- d) Surplus/defisit
- e) Pembiayaan
- f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Operasional-(LO)

Laporan operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Pelaporan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang tersiri dari ekuitas awal, surplus/defisit –LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu (SAP 2010). Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah yang

diharapkan dapat diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang kurangnya pos-pos berikut:

- a) Aset Lancar
- b) Aset tetap
- c) Aset lainnya
- d) Kewajiban jangka pendek
- e) Kewajiban jangka panjang
- f) Ekuitas dana lancar
- g) Ekuitas dana investasi.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terperinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca. Catatan Atas Laporan Keuangan sekurang kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
- c. yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- o. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Rekomendasi BPK-RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2012;
- s. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang penerapan standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019;
- w. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- x. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan pemendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Dinas Pendidikan tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran
2. Laporan Realisasi Anggaran SKPD
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Neraca Komparatif Dinas Pendidikan Pemuda dan olah Raga

Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Kebijakan Akuntansi

- 2.1 Entitas Akuntansi /Entitas Pelaporan Keuangan Secara Umum
- 2.2. Basis dan Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD
- 2.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD
- 2.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah pada SKPD

Bab III Penjelasan Pos-Pos laporan Keuangan

- 3.1 Penjelasan Pos-Pos laporan Realisasi Keuangan
 - 3.1.1 Pendapatan
 - 3.1.2 Belanja
- 3.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
 - 3.2.1 Pendapatan
 - 3.2.2 Beban
- 3.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 3.4 Penjelasan Pos Pos Neraca
 - 3.4.1 Aset
 - 3.4.2 Kewajiban
 - 3.4.3 Ekuitas Dana

Bab IV Penutup Lapiran Tambahan

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI

2.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.

2.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja, asset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Basis akrual untuk realisasi anggaran bahwa pendapatan dan belanja diakui saat transaksi telah terjadi atau diterimanya suatu manfaat. Untuk neraca berarti bahwa asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

2.3.1. Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Kas adalah uang tunai saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang liquid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal.

2.3.2 Kas dan Setara Kas Bendahara Penerimaan

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan oleh bendahara pengeluaran yang digunakan untuk mencatat kas setara.

2.3.3 Persediaan

Berdasarkan surat edaran gubernur Jawa tengah nomor : 900/010567 tanggal 23 Oktober 2014 bahwa perlakuan persediaan adalah sebagai berikut:

- Pencatatan persediaan menggunakan metode pereodik yaitu pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak mengupdate jumlah persediaan. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan inventarisasi fisik (stock opname) yang dituangkan dalam berita Acara Hasil Stock Opname per 31 Desember 2019.
- Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan di neraca, tetapi diungkapkan di CALK.

2.3.4. Pengukuran Aset Tetap Secara Umum

- a. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- b. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya dipindah.
- c. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- e. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembeliannya.
- f. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.

- g. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena penukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh atau dinilai wajar aset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- h. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- i. Perubahan aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

2.3.5. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

2.3.6. Peralatan dan Mesin

- Mesin dan peralatan diukur berdasar seluruh biaya yang dikeluarkan untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

2.3.7. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai.

Biaya ini meliputi harga beli, atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, Notaris dan pajak.

2.3.8. Jalan, Jaringan dan Instalasi

- Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk di dalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan dan jembatan tersebut siap digunakan.
- Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk di dalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap digunakan.
- Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk di dalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

2.3.9. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung yaitu berupa buku buku dan peralatan sekolah diukur biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan.

2.3.10 Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset yang berasal dari reklas aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data asset lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi yang dilakukan antara pengurus barang Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung, karena asset lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka asset ini direncanakan akan diajukan penghapusan.

2.3.11. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

2.3.12 Kewajiban Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

2.3.13 Ekuitas Dana

Ekuitas Dana terdiri dari :

- Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.
- Ekuitas Dana Inventasi
Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah investasi permanen aset tetap, aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.
- Ekuitas Dana Cadangan
Ekuitas Dana Cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

2.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung mengacu pada peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap, serta mengacu pada Peraturan Gubernur No 96 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dimana kebijakan akuntansi yang dilakukan setiap tahun anggaran dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

3.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1.1 PENDAPATAN

Anggaran Pendapatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga adalah Rp. 33.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 242.766.000 yang berasal dari pendapatan redistribusi daerah berupa pendapatan sewa gedung GOR.

3.1.2. BELANJA

Realisasi belanja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 522.572.457.044,00 dari anggaran Rp. 540.468.239.886,00 atau 97%.

3.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 482.497.164.373,00 dari anggaran Rp. 500.374.835.953,00 yang terdiri dari:

3.1.2.1.1 Belanja Pegawai Tidak Langsung

Belanja pegawai tahun anggaran 2019 adalah Rp. 402.970.754.564,00 dengan rincian sebagai berikut;

NO	URAIAN	ANGGARAN	2019	2018
1	Belanja Pegawai	412.945.787.964	402.970.754.564	428.064.983.895

3.2.2.1.2. Belanja Pegawai dan Barang Jasa dari Belanja Langsung

Belanja pegawai dari belanja langsung sebesar Rp. 42.266.757.816,00 sedangkan Belanja barang dan jasa tahun 2019 sebesar Rp. 38.200.672.989,00 dengan rincian sebagai berikut

NO	URAIAN	ANGGARAN	2019	2018
2	BELANJA PEGAWAI (B.LANGSUNG)	44.655.934.109	42.266.757.816	30.626.607.850
3	BELANJA BARANG DAN JASA	42.773.113.880	38.200.672.989	37.846.980.197

3.2.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2019 sebesar Rp.39.134.271.675 dari anggaran senilai Rp.40.093.404.933. dengan rincian sebagai berikut

NO	URAIAN	ANGGARAN	2019	2018
3	BELANJA MODAL	40.093.403.933	39.134.271.675	32.421.705.355

3.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERSIONAL (LO)

3.2.1 PENDAPATAN

Pendapatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga tahun 2019 adalah Rp. 6.202.143.135 yang terdiri dari Restribusi pemakaian kekayaan daerah senilai Rp. 238.266.000 bersumber dari Pendapatan Sewa gedung Olah Raga senilai Rp.181.420.000 dan Pendapatan sewa mess atlet senilai Rp. 56.846.000. Pada tahun anggaran 2019 juga ada pelunasan piutang pendapatan sewa gedung senilai Rp. 4.500.000 sehingga setoran pada tahun 2019 senilai Rp. 242.766.000. yang berasal dari pendapatan restribusi daerah berupa pendapatan sewa gedung GOR. Pendapatan juga bersumber dari pendapatan hibah dari pemerintah senilai Rp. 2.496.483.984 serta Pendapatan hibah dari kelompok masyarakat senilai Rp. 3.467.393.151.

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
8	PENDAPATAN – LO	6.202.143.135,00
81	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	238.266.000,00
812	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	238.266.000,00
81215	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	238.266.000,00
8121505	Retribusi sewa gedung olah raga - LO	181.420.000,00
8121512	Retribusi Gedung dan Bangunan - LO	56.846.000,00
83	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	5.963.877.135,00
831	Pendapatan Hibah – LO	5.963.877.135,00
83101	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	2.496.483.984,00
8310101	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	2.496.483.984,00
83104	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan – LO	3.467.393.151,00
8310401	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat – LO	3.467.393.151,00
	Jumlah Pendapatan	6.202.143.135,00

BEBAN

3.2.2

Beban operasional Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung selama Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 517.811.704.369,99 dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN BEBAN OPERASIONAL

NO	URAIAN	2019
9	BEBAN	517.811.704.369,99
91	BEBAN OPERASI	509.778.484.632,11
911	Beban Pegawai	446.406.589.251,00
912	Beban Barang dan Jasa	38.390.633.955,00
917	Beban Penyusutan dan Amortisasi	24.981.161.386,00
93	Defisit Non Operasional	8.033.219.737,88

Defisit untuk tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 511.609.561.234,00

3.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Perubahan ekuitas Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah
1	Ekuitas Awal	490.758.184.237,36
2	Surplus / (Defisit) LO	-511.609.561.234,99
3	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi	74.490.454.899,97
4	Ekuitas untuk dkonsolidasikan	460.176.484.301,00
5	Ekuitas Akhir	513.815.562.203,34

Ekuitas awal 2019 adalah sebesar Rp. 490.758.184.237,36, Kemudian dikurangi dengan defisit LO sebesar Rp. -511.609.561.234,99 dan ditambah dengan koreksi perubahan kebijakan sebesar Rp. 74.490.454.899,97, Sehingga ekuitas untuk dikonsolidasikan adalah Rp. 460.176.484.301,00 Ekuitas Akhir adalah Rp. 513.815.562.203,34

3.4 PENJELASAN POS-POS NERACA

3.4.1. Aset

3.4.1.1. Aset Lancar

3.4.1.1.1. Kas Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di bendahara pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp.8.772.916,00,- Nilai tersebut adalah sisa uang belanja selama tahun anggaran. Terdiri dari UYHD senilai Rp 8.699.430,- dan uang dari pajak yang belum disetor senilai Rp.73.486.

3.4.1.1.2. Kas di Bendahara Bos

Kas di bendahara bos per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.11.133.596.294,-. Nilai tersebut adalah dari penjumlahan saldo akhir kas di bendahara bos SD sejumlah Rp. 6.554.452.071,- dan di bendahara BOS SMP senilai Rp 4.579.144.223,- Uang tersebut adalah sisa dari penggunaan dana BOS yang ditransfer dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya ke masing-masing sekolah negeri di wilayah Kabupaten Temanggung. Uang tersebut tidak dikembalikan ke Kas Umum Daerah tetapi tetap disimpan di kas sekolah yang ada di rekening bank atau brankas, uang tersebut akan digunakan untuk melanjutkan kegiatan operasional sekolah di tahun 2020. Perhitungan untuk sisa kas akhir periode 2019 adalah sebagai berikut;

**PERHITUNGAN DANA BOS SD
TAHUN 2019**

Keterangan	Jumlah
1 SISA BOS 2018 SD	3.691.940.926
2 PENDAPATAN BOS SD	
3 TRANSFER BOS KE REK SD 2019	42.819.520.000
4 PENGEMBALIAN LEBIH SALUR	558.400.000
5 PENDAPATAN BOS SESUAI ALOKASI (5=3-4)	42.261.120.000
6 PENDAPATAN DARI BANK (khusus bunga yang surplus)	
7 PENDAPATAN BUNGA	0
8 BEA ADMIN BANK	0
9 PAJAK BUNGA BANK	0
10 PENDAPATAN DARI BANK (10=7-8-9)	0
11 SETORAN SURPLUS BUNGA KE REK RKPPKD di th 2019	0
12 DANA BOS TERSEDIA TAHUN 2019	45.953.060.926
13 BELANJA SISA BOS 2018 SD	
14 BELANJA PEGAWAI	242.372.000
15 BELANJA BARANG JASA	1.718.540.692
16 BELANJA MODAL	1.497.676.768 +
17 JUMLAH BELANJA SISA BOS 2017 (17=14+15+16)	3.458.589.460
18 BELANJA BOS PERIODE 2019 SD	
19 BELANJA PEGAWAI	8.598.291.350
20 BELANJA BARANG JASA	20.270.613.333
21 BELANJA MODAL	9.709.292.839 +
20 JUMLAH BELANJA BOS PERIODE 2018 (20=17+18+19)	38.578.197.522
21 SISA BOS 2018 SDN (21=12-16-20)	3.916.273.944
22 PENGEMBALIAN KARENA AUDIT BOS 2018	55.223.553
23 SISA BOS SD 2019 + Pengembalian (23=21+22)	3.971.497.497
24 BOS AFIRMASI	
25 PENDAPATAN BOS AFIRMASI SD	4.006.000.000
26 Belanja BOS Afirmasi SD	
27 BELANJA BARANG JASA	0 -
28 BELANJA MODAL	1.998.400.926
29 Jumlah Belanja Bos Afirmasi (29 = 27-28)	1.998.400.926
30 SISA BOS AFIRMASI SD (30=25-29)	2.007.599.074
31 BOS KINERJA	

32	PENDAPATAN BOS KINERJA SD	821.000.000
33	BELANJA BARANG JASA	0
34	BELANJA MODAL	245.644.500
35	Jumlah Belanja BOS Kinerja (33+34)	245.644.500
36	SISA BOS KINERJA SD (36=32-35)	575.355.500
37	SISA DANA BOS REGULAR + AFIRMASI + KINERJA SD (37=23+30+36)	6.554.452.071

**PERHITUNGAN DANA BOS SMP
TAHUN 2019**

Keterangan	JUMLAH
1 SISA BOS 2018 SMP	925.772.828
2 PENDAPATAN BOS SMP	
3 TRANSFER BOS KE REK SMP 2019	18.883.800.000
4 PENGEMBALIAN LEBIH SALUR	128.400.000 -
5 PENDAPATAN BOS SESUAI ALOKASI (5=3-4)	18.755.400.000
6 PENDAPATAN DARI BANK (khusus bunga yang surplus)	
7 PENDAPATAN BUNGA	0
8 BEA ADMIN BANK	0
9 PAJAK BUNGA BANK	0
10 PENDAPATAN DARI BANK (10=7-8-9)	0
11 SETORAN SURPLUS BUNGA KE REK RKPPKD 2019	0
13 DANA BOS TERSEDIA TAHUN 2019 (13=1+5+10+11)	19.681.172.828
14 BELANJA SISA BOS 2018 SMP	
15 BELANJA PEGAWAI	206.941.934
16 BELANJA BARANG JASA	462.991.915
17 BELANJA MODAL	247.567.545 +
18 JUMLAH BELANJA SISA BOS 2018 (18=15+16+17)	917.501.394
BELANJA BOS PERIODE 2019 SMP	
19 BELANJA PEGAWAI	3.306.266.233
20 BELANJA BARANG JASA	9.750.454.818
21 BELANJA MODAL	3.897.806.160 +
22 JUMLAH BELANJA BOS PERIODE 2019 (22=19+20+21)	16.954.527.211
23 SISA BOS 2019 SMPN (23=13-18-22)	1.809.144.223
 BOS AFIRMASI	
24 PENDAPATAN BOS AFIRMASI SMP	1.610.000.000

25	BELANJA MODAL	-
26	SISA BOS AFIRMASI SMP 26= (24-25)	1.610.000.000
BOS KINERJA		
27	PENDAPATAN BOS KINERJA SMP	1.160.000.000
28	BELANJA MODAL	-
29	SISA BOS KINERJA SMP 29 =27-28	1.160.000.000
Sisa Dana BOS SMP di Sekolah		4.579.144.223

3.1.1.1.3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional dinas dan barang-barang yang dimaksud untuk tidak dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari perhitungan fisik dan harga pengadaan barang terakhir (Berita Acara) yang terlampir.

Nilai persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 51.259.092,- dengan rincian sebagai berikut;

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
1170101	Persediaan Alat Tulis Kantor	9.295.992,00
1170103	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	342.281.155,00
1170104	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	861.000,00
1170105	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	18.111.100,00
1170106	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	1.265.000,00
1170109	Persediaan Barang Cetakan	655.000,00
1170110	Persediaan Lampu Penerangan dan Kelengkapannya	21.071.000,00
1170116	Persediaan Alat/Perlengkapan Kantor Lainnya	4.034.581.335,00
1170201	Persediaan Bahan baku bangunan	14.785.000,00
JUMLAH		4.442.906.582,00

3.1.1.2. Aset Tetap

Nilai belanja aset tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp.492 dengan rincian sebagai berikut;

KODE	OPD.....	SALDO AWAL 2019	BELANJA MODAL 2019	MUTASI 2018	SALDO AKHIR 2018
13	ASET TETAP	471.331.007.929,39	21.248.692.392,30	0	492.579.700.321,69
131	Tanah	50.342.362.086,00	0,00	0	50.342.362.086,00
132	Peralatan dan Mesin	113.918.926.331,00	15.544.792.840,00	0	129.463.719.171,00
	<i>penyusutan</i>	-		0	-97.118.471.711,89
		83.790.137.077,71			
133	Gedung dan Bangunan	514.265.482.407,00	10.443.310.225,00		524.708.792.632,00
	<i>penyusutan</i>	-			-189.672.105.161,93
		180.908.597.566,63			
134	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.949.921.510,00	13.033.312.311,00		19.983.233.821,00
	<i>penyusutan</i>	-			-5.748.739.626,23
		2.481.060.699,36			

KODE	OPD.....	SALDO AWAL 2019	BELANJA MODAL 2019	MUTASI 2018	SALDO AKHIR 2018
135	Aset Tetap Lainnya	59.403.770.807,61	6.259.619.057,00		65.663.389.864,61
	<i>penyusutan</i>	-	1.478.907.115,65		-5.042.480.752,87
136	Konstruksi Dalam Pengerjaan	151.728.000,00			

3.1.1.3. Aset Lainnya

Nilai aset lainnya pada periode 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 18.471.239.525.

KODE	OPD.....	SALDO AWAL 2019	BELANJA MODAL 2019	MUTASI 2018	SALDO AKHIR 2018
137	Aset Lainnya	16.893.760.100,97	1.577.479.424	18.471.239.525,00	18.471.239.525,00

3.1.2. Kewajiban

3.1.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang harus dipenuhi kurang dari 1 tahun. Kewajiban timbul setelah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga telah menikmati manfaat tetapi belum melakukan pembayaran. Sampai dengan akhir periode 31 Desember 2019, Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung masih memiliki kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 3.355.983.572,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.2.1.1 Utang Perhitungan dengan Pihak Ketiga

Utang jangka pendek dari perhitungan dengan pihak ketiga adalah Rp. 73.486,-. Pajak yang timbul dari kegiatan pembayaran dan belanja selama tahun 2019

JENIS PAJAK	UTANG PAJAK
PPN	-
PPh 21	8.577
PPh 22	-
PPH 23	-
PPh PASAL 4	-
pajak daerah catering	64.909
JUMLAH	73.486

3.1.2.1.2 Utang Belanja

Utang belanja yang dimiliki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga sampai dengan akhir periode 31 Desember 2019 sebesar Rp. 3.355.510.086,00 terdiri dari:

NO	JENIS UTANG	Tunjangan PNS	Premi Asuransi BPJS	Honorarium Non PNS	Jasa Kantor	JUMLAH LAMA
1	Beban Jasa listrik				16.505.647	16.505.647
2	Beban Jasa telepon				7.265.434	7.265.434

NO	JENIS UTANG	Tunjangan PNS	Premi Asuransi BPJS	Honorarium Non PNS	Jasa Kantor	JUMLAH LAMA
3	Beban Jasa air				1.797.050	1.797.050
4	Tambahan penghasilan berdasar beban kerja	916.451.860	-			916.451.860
5	Honoraium Cleaning Service Kantor		50.461	5.433.641		5.484.102
6	Honor jasa pelayana kantor		50.461	1.350.000		1.400.461
7	Honor Suporting staff BOS		50.461	1.200.000		1.250.461
8	Honoraium Cleaning Service Gor		555.071	24.000.000		24.555.071
9	Utang honor GTT/PTT		-	2.380.800.000		2.380.800.000
Jumlah Utang Belanja		916.451.860	706.454	2.412.783.641	25.568.131	3.355.510.086

3.1.3. Ekuitas

No	Keterangan	Jumlah
1	Ekuitas Awal	490.758.184.237,36
2	Surplus/ (Defisit) LO	-511.609.561.234,99
3	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi	74.490.454.899,97
4	Ekuitas untuk dkonsolidasikan	460.176.484.301,00
5	Ekuitas Akhir	513.815.562.203,34

Ekuitas awal tahun adalah sebesar Rp. Rp. 490,758.184.237. Selama Tahun Anggaran 2019 terjadi defisit LO sebesar Rp -483.523.174.690, dan ada koreksi perubahan kebijakan 74.490.454.899,97 untuk ekuitas dikonsolidasikan Rp. 513.815.562.203,34

BAB IV PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2019 disusun sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan-laporan keuangan.

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Temanggung, 17 Januari 2020
Pejabat Penatausahaan Keuangan

Drs. SUYONO, MM.
NIP : 19610210 198503 1 011

YUSI SUSANTI, S.IP, MM
NIP : 19720319 199903 2 004